

PENDIDIKAN KARAKTER SEBAGAI WUJUD KEBANGKITAN BANGSA²⁹

Oleh: Ir. Hendarman, M.Sc. Ph.D³⁰

Kepala Pusat Penelitian Kebijakan, Balitbang Kemdiknas RI

Abstrak

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mencanangkan gerakan nasional tentang pendidikan karakter yang diterapkan pada sistem pendidikan nasional. Pencanangan tersebut sebagai tanggapan terhadap berbagai permasalahan bangsa terutama yang memunculkan perilaku yang menabrak etika, moral dan hukum sehingga nilai-nilai kemanusiaan dan peradaban perlahan-lahan luntur dari budaya dan kultur bangsa Indonesia. Sektor pendidikan menjadi pilar untuk memulai pengembangan dan penegakan dan karakter bangsa. Makalah ini mengkaji penyelenggaraan pendidikan karakter dalam proses pendidikan dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama, adat istiadat serta aturan yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis. Lebih lanjut diuraikan arah, tahapan dan prioritas penyelenggaraan pendidikan karakter yang diintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang ada, bukan sebagai suatu mata pelajaran sendiri. Tingkat keberhasilan penyelenggaraan pendidikan karakter ini akan sangat tergantung dari kolaborasi antara berbagai unsur yang terkait yaitu pendidikan di sekolah, keluarga dan masyarakat.

kata kunci: *pendidikan karakter, nilai, perilaku, etika, moral, hukum.*

1. Latar Belakang

Pada kenyataan yang terjadi selama ini, masalah karakter bangsa sangat merisaukan, dimana muncul sejumlah kasus yang berada di luar akal sehat manusia. Yang menimbulkan keprihatinan yaitu bahwa pelakunya justru adalah orang-orang yang berpendidikan. Berbagai ketidaklayakan perilaku tersebut dilakukan bukan tanpa kesadaran, bahkan dilakukan secara berencana dan sistematis. Sehubungan dengan hal tersebut, setahun lalu pada hari Pendidikan Nasional tahun 2010, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan pendidikan karakter sebagai gerakan nasional. Pada saat itu, Presiden mengajak semua pihak bergerak bersama, membangun pendidikan karakter. Sebagaimana disampaikan Presiden bahwa pendidikan karakter mendesak diterapkan pada sistem pendidikan nasional.

Makalah ini mengkaji sejumlah permasalahan yang dapat dijadikan penguat untuk menyegerakan penyelenggaraan pendidikan karakter dalam proses pembelajaran. Permasalahan tersebut dirujuk dari berbagai peristiwa dan catatan-catatan yang terdapat dalam berbagai buku, media, dan sebagainya. Pada bagian selanjutnya pengertian pendidikan karakter dibahas di dalam makalah ini untuk memberikan gambaran batasan serta pemahaman yang dimiliki berbagai pakar atau lembaga terhadap pendidikan karakter.

Landasan untuk memungkinkan penyelenggaraan pendidikan dasar di persekolahan diketengahkan dengan merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku selama ini, serta berbagai kajian dari berbagai agama yang ada. Kajian dimaksud sebagai fondasi untuk memperoleh legalisasi betapa pendidikan karakter tidak menyimpang dari proses hukum yang ada baik tertulis maupun tidak tertulis. Bagian selanjutnya menjelaskan mengenai arah, serta tahapan dan prioritas penyelenggaraan pendidikan karakter bangsa yang dicanangkan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional. Bagian ini akan memberikan ilustrasi sejauhmana kesungguhan Pemerintah untuk menyelesaikan pembangunan karakter melalui pendidikan.

²⁹ Makalah disampaikan pada Pasca Sarjana UPI dengan tema "Pendidikan Karakter Bangsa Berbudaya Pancasila" diselenggarakan oleh jurusan Administrasi Pendidikan, Pasca Sarjana UPI di Purwakarta: 21 Mei 2011

³⁰ Peneliti Madya bidang Kebijakan Pendidikan; dan dosen pada FKIP, Universitas Pakuan, Bogor

Bagian terakhir makalah menguraikan sejumlah prinsip yang digunakan untuk mengembangkan pendidikan karakter di persekolahan. Salah satu prinsip utama adalah bahwa pembelajaran dilakukan melalui integrasi ke dalam mata-mata pelajaran yang ada.

2. Permasalahan

Di kalangan pelajar dan mahasiswa telah menggejala terjadinya keprihatinan dekadensi moral. Perilaku menabrak etika, moral dan hukum dari yang ringan sampai yang berat masih kerap diperlihatkan oleh pelajar dan mahasiswa. Kebiasaan "mencontek" pada saat ulangan atau ujian masih dilakukan. Keinginan lulus dengan cara mudah dan tanpa kerja keras pada saat ujian nasional menyebabkan mereka berusaha mencari jawaban dengan cara tidak beretika. Mereka mencari "bocoran jawaban" dari berbagai sumber yang tidak jelas. Pada mereka yang tidak lulus, ada di antaranya yang melakukan tindakan nekat dengan menyakiti diri atau bahkan bunuh diri. Perilaku tidak beretika juga ditunjukkan oleh mahasiswa. Plagiarisme atau penjiplakan karya ilmiah di kalangan mahasiswa juga masih bersifat masif. Bahkan ada yang dilakukan oleh mahasiswa program doktor. Semuanya ini menunjukkan kerapuhan karakter di kalangan pelajar dan mahasiswa (Kementerian Pendidikan Nasional, 2010a).

Hal lain yang menggejala di kalangan pelajar dan mahasiswa berbentuk "kenakalan". Beberapa di antaranya adalah tawuran antarpelajar dan antarmahasiswa. Di beberapa kota besar tawuran pelajar menjadi tradisi dan membentuk pola yang tetap, sehingga di antara mereka membentuk "musuh bebuyutan". Tawuran juga kerap dilakukan oleh para mahasiswa. Bentuk kenakalan lain yang dilakukan pelajar dan mahasiswa adalah meminum minuman keras, pergaulan bebas, dan penyalahgunaan narkoba yang bisa mengakibatkan depresi bahkan terkena HIV/AIDS.

Dalam konteks penyalahgunaan narkoba, data dari Badan Narkotika Nasional tahun 2010 menunjukkan terjadinya peningkatan jumlah kasus yang melibatkan pelajar dan mahasiswa; walaupun di sisi lain jumlah tersangka cenderung menurun pada tahun 2009 (Kompas, 11 Maret 2011). Maraknya kasus narkoba dan kenakalan remaja di Indonesia dapat menjadi indikasi tingginya tingkat depresi terselubung pada remaja. Jadi, dapat disimpulkan bahwa depresi pada remaja adalah persoalan yang serius, dengan dampak kesehatan dan ekonomi publik yang luas.

Fenomena lain yang mencoreng citra pelajar adalah dan lembaga pendidikan adalah maraknya "gang pelajar" dan "gang motor". Perilaku mereka bahkan seringkali menjurus pada tindak kekerasan (*bullying*) yang meresahkan masyarakat dan bahkan tindakan kriminal seperti pemalakan, penganiayaan, bahkan pembunuhan. Perilaku *bullying* merupakan kejadian yang menimbulkan tekanan dan salah satu pengalaman hidup negatif yang diakibatkan oleh hubungan sosial yang timpang adalah motif seorang remaja rentan terhadap gejala depresi. Perilaku *bullying* disebutkan sebagai faktor resiko berkembangnya depresi pada korban dan pelaku perilaku *bullying*. Perilaku *bullying* dapat didefinisikan sebagai bentuk perilaku agresi yang dilakukan dengan sengaja, terus-menerus dan melibatkan target khusus yaitu anak lain yang lebih lemah dan mudah diserang.

Berdasarkan hasil penelitian di lima kota di tanah air, 16,35% dari 1.388 responden dari kalangan remaja mengaku telah melakukan hubungan seks di luar nikah atau seks bebas. Sebanyak 42,5% responden di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) melakukan hubungan seks di luar nikah dengan pasangannya, sedangkan 17% responden di Palembang (Sumatera Selatan) dan Tasikmalaya (Jawa Barat), mengaku juga melakukan tindakan yang sama. Di Singkawang (Kalimantan Barat), 9% remaja responden juga melakukan seks bebas dan 6,7% responden di Cirebon (Jawa Barat) termasuk penganut seks bebas.³¹

³¹ Administrator. (26 Februari 2011). Seks Bebas di Kalangan Remaja, Penyimpangan, Kenakalan atau Gaya Hidup??? http://priangan20.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1583:seks-bebas-di-kalangan-remaja-penyimpangan-kenakalan-atau-gaya-hidup&catid=50:education&Itemid=75

Kasus seks bebas di kota-kota besar lainnya seperti Medan, Jakarta, Bandung, Jogjakarta, dan Surabaya juga sangat tinggi, bahkan melebihi angka 50%. Yang mengejutkan adalah untuk kota Jogjakarta dimana sekitar 97,05% remaja Jogja telah melakukan seks bebas. Penelitian ini dilakukan oleh Lembaga Studi Cinta dan Kemanusiaan serta Pusat Pelatihan Bisnis dan Humaniora (LSCK PUSBIH) dengan melibatkan 1666 responden. Diduga bahwa hal terjadi karena kurangnya kontrol sosial terhadap remaja Jogjakarta yang sebagian besar pelajar. Terkait dengan seks bebas, beberapa penelitian menunjukkan bahwa tujuh dari sepuluh perempuan telah melakukan hubungan seksual sebelum berumur 20 tahun. Sementara satu dari enam pelajar perempuan aktif bergaul seks bebas. Paling sedikit mereka berganti pasangan dengan empat laki-laki yang berbeda-beda.

Meningkatnya jumlah kasus seks bebas menyebabkan makin tingginya jumlah kehamilan yang tidak diinginkan (KTD). Kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) pada remaja menunjukkan kecenderungan meningkat antara 150.000 hingga 200.000 kasus setiap tahun. Beberapa survei yang dilakukan pada sembilan kota besar di Indonesia menunjukkan bahwa KTD mencapai 37.000 kasus. Dari kasus tersebut, 27 persen di antaranya terjadi dalam lingkungan pra-nikah dan 12,5 persen adalah pelajar.

Berbagai perilaku yang tidak terpuji tersebut pada akhirnya akan menjadi kendala bagi kemajuan suatu bangsa. Bangsa yang menjunjung tinggi dan membiasakan perilaku serta akhlak mulia diikuti dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi akan berpotensi menjadi bangsa yang maju, diperhitungkan dalam kancah dunia. Sejarah telah mencatat bahwa kehancuran peradaban suatu bangsa atau musnahnya suatu bangsa, banyak disebabkan oleh karakter atau akhlak warga negaranya yang tidak terpuji (Kementerian Pendidikan Nasional, 2010b).

3. Pengertian Pendidikan Karakter

Pendidikan melalui satuan pendidikan atau sekolah pada hakekatnya bukanlah sekadar tempat “*transfer knowledge*” semata-mata. Seperti dikemukakan Fraenkel (1977:1-2), sekolah tidaklah semata-mata tempat di mana guru menyampaikan pengetahuan melalui berbagai mata pelajaran. Sekolah juga merupakan sebuah lembaga yang mengusahakan usaha dan proses pembelajaran yang berorientasi pada nilai (*value-oriented enterprise*). Kutipan dari John Childs menyatakan bahwa organisasi sebuah sistem sekolah dalam dirinya sendiri merupakan sebuah usaha moral (*moral enterprise*), karena ia merupakan usaha sengaja masyarakat manusia untuk mengontrol pola perkembangannya.

Untuk dapat menjadikan pendidikan tidak hanya menghasilkan insan yang cerdas tetapi terlebih penting adalah berkarakter, maka perlu dikutip pandangan Philips (2000) yaitu “*if there is righteousness in the heart, there will be beauty in the character; if there is beauty in the character, there will be harmony in the home; if there is harmony in the home, there will be order in the nation; if there is order in the nation, there will be peace in the world*”—yang kalau disederhanakan diartikan bahwa pendidikan karakter harus melibatkan semua pihak; rumah tangga dan keluarga; sekolah dan lingkungan sekolah lebih luas (masyarakat). Dalam konteks ini hubungan dan sinergi yang erat di antara komponen tersebut menjadi prasyarat utama karena tampaknya ketiga komponen jejaring pendidikan tersebut nyaris terputus hubungannya.

Menurut Elkind & Sweet (2004) dalam Kementerian Pendidikan Nasional (2011c), pendidikan karakter dimaknai sebagai berikut: “*character education is the deliberate effort to help people understand, care about, and act upon core ethical values. When we think about the kind of character we want for our children, it is clear that we want them to be able to judge what is right, care deeply about what is right, and then do what they believe to be right, even in the face of pressure from without and temptation from within*” (dalam terjemahan bebas diartikan bahwa pendidikan adalah usaha yang berkesinambungan untuk membantu manusia mengerti, meresapi dan bertindak atas dasar nilai-nilai etika yang pokok).

Sedangkan T. Ramli (2003) dalam Kementerian Pendidikan Nasional (2011c) mengatakan bahwa pendidikan karakter memiliki esensi dan makna yang sama dengan pendidikan moral dan pendidikan akhlak. Lebih lanjut dikatakannya bahwa tujuan pendidikan ini adalah untuk membentuk pribadi anak supaya menjadi manusia yang baik, warga masyarakat dan warga negara yang baik. Kriteria baik secara umum adalah pencerminan dari nilai-nilai sosial tertentu dalam perilaku sehari-hari yang cenderung dipengaruhi oleh budaya masyarakat dan bangsanya. Dengan demikian, menurut Ramli, hakekat dari pendidikan karakter dalam konteks pendidikan di Indonesia adalah pendidikan nilai, yakni penanaman nilai-nilai luhur yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia sendiri dalam rangka membina kepribadian generasi muda.

Kementerian Pendidikan Nasional (2010a) dalam rencana besar (*grand design*) tentang pendidikan karakter menekankan bahwa secara psikologis dan sosial kultural, pembentukan karakter dalam diri individu merupakan fungsi dari seluruh potensi individu manusia (kognitif, afektif, dan psikomotorik) dalam konteks interaksi sosial-kultural (dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat) dan berlangsung sepanjang hayat. Konfigurasi karakter dalam konteks totalitas proses psikologis dan sosial-kultural tersebut dalam dikelompokkan dalam 4 (empat) olah. Keempat olah tersebut adalah Olah Hati (*spiritual and emotional development*), Olah Pikir (*intellectual development*), Olah Raga dan Kinestetik (*physical and kinesthetic development*), dan Olah Rasa dan Karsa (*affective and creativity development*).

Pembicaraan dan wacana tentang membangun kembali watak bangsa yang berkarakter sesungguhnya telah memenuhi ruang publik sejak lama. Sebagai yang diamati, krisis watak bangsa yang terjadi telah menimbulkan disrupsi dan dislokasi dalam kehidupan sosial dan kultural bangsa, yang secara berkesinambungan akan dapat mengancam integritas bangsa secara keseluruhan. Hampir sepakat bahwa yang diinginkan adalah terciptanya masyarakat Indonesia yang memiliki jati diri; berkepribadian dan berkarakter yang tangguh; berpegang teguh pada nilai-nilai demokratis; menghargai tinggi hukum dan peraturan perundang-undangan; berkeadilan sosial, politik dan ekonomi; memiliki kesalehan individual formal dan kesalehan komunal-sosial sekaligus; berkeadaban dalam lingkup masyarakat madani; menghargai keragaman dan kehidupan multikultural; dan memiliki perspektif lokal, nasional dan global sekaligus.

Menarik untuk menyimak pendapat Lickona (1991) yang mengatakan bahwa pendidikan moral bukan merupakan gagasan baru. Hal ini disebabkan bahwa pendidikan moral sudah ada sejak pendidikan itu dimulai. Yang sama-sama diketahui bahwa di berbagai negara, pendidikan sebenarnya memiliki dua tujuan besar yaitu di satu sisi untuk membantu generasi muda menjadi cerdas dan pada saat yang bersamaan menjadikan mereka baik dan berkarakter. Ditambahkan bahwa pendidikan karakter atau moral merupakan kunci utama untuk keberhasilan masyarakat yang demokratis. Melalui pendidikan karakter dapat dibentuk nilai-nilai respek terhadap hak-hak dari masing-masing individu, patuh terhadap aturan atau hukum, mau berperan serta secara voluntir dalam kehidupan bermasyarakat dan peduli terhadap hal-hal umum yang sifatnya baik. Lebih lanjut Lickona menegaskan bahwa karakter merupakan bagian-bagian yang saling berkaitan erat yaitu *moral knowing*, *moral feeling*, and *moral behavior* (dalam terjemahan bebas yaitu keterkaitan antara pengetahuan, perasaan dan tindakan moral), yang dijadikan pembiasaan atau habituasi dalam 3 pembiasaan yaitu pikiran (*habits of the mind*), nurani (*habits of the heart*), dan aksi (*habits of action*).

Berdasarkan pembahasan di atas dapat diinferensikan bahwa pendidikan karakter sesungguhnya merupakan upaya-upaya yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis untuk menanamkan nilai-nilai perilaku peserta didik yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata karma, budaya, dan adat istiadat.

4. Landasan Untuk Mengembangkan Pendidikan Karakter³²

UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 3, menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Di samping itu, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan pada Pasal 17 Ayat (3) menyebutkan bahwa pendidikan dasar, bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang (a) beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (b) berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur; (c) berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif; (d) sehat, mandiri, dan percaya diri; (e) toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggungjawab. Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa tujuan pendidikan di setiap jenjang, termasuk SMP sangat berkaitan dengan pembentukan karakter peserta didik.

Pendidikan karakter tidak saja merupakan tuntutan undang-undang dan peraturan pemerintah, tetapi juga oleh agama. Setiap Agama mengajarkan karakter atau akhlak pada pemeluknya. Dalam Islam, akhlak merupakan salah satu dari tiga kerangka dasar ajarannya yang memiliki kedudukan yang sangat penting, di samping dua kerangka dasar lainnya, yaitu aqidah dan syariah. Nabi Muhammad SAW dalam salah satu sabdanya mengisyaratkan bahwa kehadirannya di muka bumi ini membawa misi pokok untuk menyempurnakan akhlak manusia yang mulia. Akhlak karimah merupakan sistem perilaku yang diwajibkan dalam agama Islam melalui nash al-Quran dan Hadis.

Sifat-sifat khusus (akhlak) yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW maupun para nabi dan rasul yang lain adalah: (1) *Shiddiq*, yang berarti jujur. Nabi dan rasul selalu jujur dalam perkataan dan perilakunya; (2) *Amanah*, yang berarti dapat dipercaya dalam kata dan perbuatannya; (3) *Tabligh*, yang berarti menyampaikan apa saja yang diterimanya dari Allah (wahyu) kepada umat manusia; (4) *Fathanah*, yang berarti cerdas atau pandai, sehingga dapat mengatasi semua permasalahan yang dihadapinya; (5) *Ma'shum*, yang berarti tidak pernah berbuat dosa atau maksiat kepada Allah. Sebagai manusia bisa saja nabi berbuat salah dan lupa, namun lupa dan kesalahannya selalu mendapat teguran dari Allah sehingga akhirnya dapat berjalan sesuai dengan kehendak Allah.

Agama Hindu juga memandang penanaman karakter kepada anak sangat penting. Kitab suci Veda menyatakan: “Saudara laki-laki seharusnya tidak irihati terhadap kakak dan adik-adiknya laki-laki dan perempuan, dan melakukan tugas-tugas yang sama yang dibebankan kepadanya. Hendaknya berbicara mesra di antara mereka” (Atharvaveda: III,30.3). “Putra dan orang tuanya yang saleh, gagah berani dan bercahaya bagaikan api menyinari bumi dengan perbuatan-perbuatannya yang mulia” (Rgveda I.160.3).

Ajaran suci Veda dan sastra Hindu lainnya memandang anak atau putra sebagai pusat perhatian dan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan. Dalam hal ini, umat Hindu meyakini bahwa karakter seorang anak sangat pula ditentukan oleh kedua orang tuanya, lingkungannya dan upacara-upacara yang berkaitan dengan proses kelahiran seorang anak. Ketika seorang anak lahir, maka karakter seseorang dapat dilihat pada hari kelahirannya yang disebut *Daúavara* (hari yang sepuluh), yaitu: “*pandita, pati, sukha, dukkha, úri, manuh, manuûa, raja, deva, dan rakûaûa*”. Demikian pula pemberian nama kepada seorang anak dikaitkan pula dengan karakter anak sesuai hari *Daúavara*-nya.

³² Kementerian Pendidikan Nasional. (2010). Panduan Pendidikan Karakter di Sekolah Menengah Pertama. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah.

Agama Kristen dan Katholik memandang penting karakter seseorang. Seperti terlihat pada 2 Tesalonika 3 : 6 – 12. Alkitab memberi contoh berbagai macam profesi seperti: Abraham sebagai pengusaha, Yusuf sebagai kepala pelayanan & perdana menteri, Samuel sebagai hakim, Daud sebagai gembala & raja, Petrus sebagai nelayan, Lidia sebagai pedagang, Paulus dan Akhila sebagai tukang tenda, Lukas sebagai dokter, Yesus sebagai tukang kayu.

Agama Buddha juga sangat menekankan pentingnya karakter. Seseorang hendaknya tidak berbuat jahat, menambah kebaikan-kebaikan, menyucikan hati dan pikiran (*Dhammapada: 183*). Kebencian tak akan berakhir jika dibalas dengan kebencian. Kebencian berakhir jika dibalas dengan cinta kasih (*Dhammapada: 183*). Sopan santun wajib diterapkan kepada orang tua, guru, keluarga, sahabat dan kawan-kawan, atasan atau majikan, dan pelayan/pekerja (*Sutta Pitaka, Digha Nikaya 31*). Terdapat dua dharma sebagai pelindung dunia (*lokapala-dhamma*), yakni *Hiri* dan *Ottappa*. *Hiri* adalah malu berbuat jahat dan *Ottappa* adalah takut akibat berbuat jahat. Jika setiap manusia di dunia ini dapat mengamalkan dua ajaran ini, maka dunia akan damai (*Anguttara Nikaya I:51*). Empat sifat luhur, yakni cinta kasih (*metta*), belas kasih (*karuna*), simpati (*mudita*), dan batin seimbang (*upekkha*). *Digha Nikaya II (196), III (220). Dhammasangani (262), Visudhimagga (320)*.

5. Arah Serta Tahapan Dan Prioritas Pendidikan Karakter Bangsa Tahun 2010-2025³³

Arah dan Sasaran

Pendidikan karakter menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pencapaian visi pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005—2025, yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Untuk melaksanakan fungsi dan tujuan pendidikan karakter, telah diterbitkan Permendiknas No. 23/2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan yang secara formal sudah digariskan untuk masing-masing jenis atau satuan pendidikan sejumlah rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Jika dicermati secara mendalam, sesungguhnya hampir pada setiap rumusan SKL tersebut implisit atau eksplisit termuat substansi nilai/karakter. Agar tercapai daya guna dan hasil guna yang optimal perlu disusun tahapan pembangunan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan pentingnya permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu, skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda, namun semua itu harus berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pendidikan karakter yang ditetapkan. .

Tahapan dan Prioritas

Untuk dapat mencapai tujuan pendidikan nasional yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, diperlukan pentahapan dan skala prioritas program pendidikan karakter bangsa. Penyusunan pentahapan dan skala prioritas jangka panjang dan jangka menengah disesuaikan dengan Desain Induk Pembangunan Karakter Bangsa tahun 2010 – 2025. Tahapan dan skala prioritas program pendidikan karakter disusun sebagai berikut.

³³ Sumber: Kementerian Pendidikan Nasional. (2010). Desain Induk Pendidikan Karakter Kementerian Pendidikan Nasional.

Tahap I dan Prioritas 2010—2014

Tahap ini merupakan fase konsolidasi dan implementasi dalam rangka: (1) reorientasi menumbuhkan kesadaran sikap dan keyakinan pentingnya penghayatan nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara melalui proses pembelajaran dan pengembangan budaya sekolah; (2) penyusunan perangkat kebijakan yang terpadu yang berupa tersusunnya kembali kurikulum berbasis ideologi Pancasila; (3) implementasi perangkat kebijakan agar dapat melaksanakan pendidikan karakter secara efektif dengan memberdayakan seluruh subjek yang terkait; (4) evaluasi yang ditujukan pada satuan pendidikan sebagai pelaksana pendidikan karakter bangsa. Pada akhir tahap ini pendidikan karakter bangsa diarahkan untuk mewujudkan peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan menyadari dan meyakini kembali Pancasila sebagai dasar pandangan hidup bangsa.

Tahap II dan Prioritas 2015—2019

Tahap II merupakan fase pemantapan strategi dan implementasi. Prioritas pada tahap ini adalah melakukan pemantapan strategi dan implementasi pendidikan karakter. Prioritas tersebut berbentuk (1) monitoring dan evaluasi tahap I; (2) pengokohan dan pemantapan nilai etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta kesadaran sikap dan keyakinan pentingnya penghayatan nilai-nilai Pancasila; (3) pemantapan pengukuhan kurikulum berbasis ideologi Pancasila yang terintegrasi dalam setiap kelompok mata pelajaran secara holistik; (4) pemantapan perangkat kebijakan agar dapat melaksanakan pendidikan karakter bangsa secara lebih efektif; (5) tetap melaksanakan evaluasi dan monitoring yang ditujukan pada satuan pendidikan sebagai pelaksana pendidikan karakter bangsa. Pada akhir tahap ini pendidikan karakter bangsa diarahkan untuk memantapkan peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan yang menjunjung etika dan kemampuan tinggi dalam memanifestasikan nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam kehidupan sehari-hari.

Tahap III dan Prioritas 2020—2024

Tahap III merupakan fase pengembangan berkelanjutan dari hasil yang telah dicapai pada tahap I dan II. Prioritas tersebut berbentuk (1) monitoring dan evaluasi tahap II; (2) pengukuhan, pemantapan dan pembudayaan nilai etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (3) pemantapan pengukuhan kurikulum berbasis ideologi Pancasila yang terintegrasi dalam setiap kelompok mata pelajaran secara holistik; (4) pembinaan perangkat kebijakan pelaksanaan pendidikan karakter bangsa secara lebih efektif yang disesuaikan dengan perubahan jaman; (5) pengevaluasian dan monitoring yang ditujukan pada satuan pendidikan sebagai pelaksana pendidikan karakter bangsa; (6) peningkatan ketahanan nasional bangsa Indonesia dengan memupuk semangat persatuan dan kesatuan, toleransi antarumat beragama, antarsuku bangsa, antarras, antaradat, dan menjunjung tinggi kesetaraan gender atau pengarusutamaan gender. Pada akhir tahap ini diharapkan akan terwujud masyarakat yang berketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berjiwa persatuan Indonesia, berjiwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

6. Prinsip Pengembangan Pendidikan Karakter

Secara prinsipil, pengembangan karakter tidak dimasukkan sebagai pokok bahasan tetapi terintegrasi ke dalam mata pelajaran, pengembangan diri dan budaya satuan pendidikan. Oleh karena itu pendidik dan satuan pendidikan perlu mengintegrasikan nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan karakter ke dalam Kurikulum, silabus yang sudah ada.

Prinsip pembelajaran yang digunakan dalam pengembangan pendidikan karakter mengusahakan agar peserta didik mengenal dan menerima nilai-nilai karakter sebagai milik peserta didik dan

bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya melalui tahapan mengenal pilihan, menilai pilihan, menentukan pendirian, dan selanjutnya menjadikan suatu nilai sesuai dengan keyakinan diri. Dengan prinsip ini peserta didik belajar melalui proses berpikir, bersikap, dan berbuat. Ketiga proses ini dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam melakukan kegiatan sosial dan mendorong peserta didik untuk melihat diri sendiri sebagai makhluk sosial.

Pengintegrasian Pendidikan Karakter dalam Semua Materi pembelajaran

Pengintegrasian pendidikan karakter ke dalam semua materi pembelajaran dilakukan dalam rangka mengembangkan kegiatan intervensi. Substansi nilai sesungguhnya secara eksplisit atau implisit sudah ada dalam rumusan kompetensi (SKL, SK, dan KD) dalam Standar Isi (Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah), serta perangkat kompetensi masing-masing program studi di pendidikan tinggi atau PNFI. Yang perlu dilakukan lebih lanjut adalah memastikan bahwa pembelajaran materi pembelajaran tersebut memiliki dampak instruksional dan/atau dampak pengiring pembentukan karakter. Pengintegrasian nilai dapat dilakukan untuk satu atau lebih dari setiap pokok bahasan dari setiap materi pembelajaran.

Integrasi Pendidikan Karakter dalam Kegiatan Kokurikuler, Ekstrakurikuler, dan Pendidikan Nonformal

Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler akan semakin bermakna jika diisi dengan berbagai kegiatan bermuatan nilai yang menarik dan bermanfaat bagi peserta didik. Masih banyak peserta didik yang hanya belajar saja, tanpa menghiraukan kegiatan kokurikuler apalagi kegiatan ekstrakurikuler. Alasannya malas, mengganggu konsentrasi belajar, hanya membuang waktu, atau tidak bermanfaat. Tidak sedikit juga kegiatan peserta didik yang tidak mendukung peningkatan *pengembangan pribadi*.

Kegiatan yang akan mengembangkan pendidikan karakter adalah kegiatan yang terencana, terprogram, dan tersistem. Setiap kegiatan harus ada mentornya yang membimbing ke mana arah kegiatan tersebut akan dilaksanakan, walau tidak harus setiap saat ada. Program itu dapat disajikan dengan sangat menarik, mengikutsertakan teknik-teknik simulasi, bermain peran, atau diskusi. Pada peningkatan keterampilan belajar, peserta didik diajak untuk meningkatkan teknik belajar, pemetaan pikiran, dan teknik membaca. Adapun keterampilan berpikir difokuskan pada peningkatan kemampuan menyelesaikan persoalan serta mengambil keputusan. Selain itu, ada juga kecakapan hidup yang lebih ditekankan pada beberapa hal di antaranya manajemen diri, membangun impian, teknik berkomunikasi, mengelola konflik, dan mengelola waktu.

Pemberdayaan dan Pembudayaan

Pengembangan nilai/karakter dapat dilihat pada dua latar, yaitu pada latar makro dan latar mikro. Latar makro bersifat nasional yang mencakup keseluruhan konteks perencanaan dan implementasi pengembangan nilai/karakter yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan nasional. Secara makro pengembangan karakter dibagi dalam tiga tahap, yakni *perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi hasil*. Pada tahap perencanaan dikembangkan perangkat karakter yang digali, dikristalisasikan, dan dirumuskan dengan menggunakan berbagai sumber, antara lain pertimbangan (1) filosofis: Pancasila, UUD 1945, dan UU No.20 Tahun 2003 beserta ketentuan perundang-undangan turunannya; (2) teoretis: teori tentang otak, psikologis, pendidikan, nilai dan moral, serta sosiokultural; (3) empiris: berupa pengalaman dan praktik terbaik, antara lain tokoh-tokoh, satuan pendidikan formal dan nonformal unggulan, pesantren, kelompok kultural, dll.

Pada tahap implementasi dikembangkan pengalaman belajar dan proses pembelajaran yang bermuara pada pembentukan karakter dalam diri peserta didik. Proses ini dilaksanakan melalui proses pemberdayaan dan pembudayaan sebagaimana digariskan sebagai salah satu prinsip

penyelenggaraan pendidikan nasional. Proses ini berlangsung dalam tiga pilar pendidikan yakni dalam satuan pendidikan formal dan nonformal, keluarga, dan masyarakat. Dalam masing-masing pilar pendidikan akan ada dua jenis pengalaman belajar yang dibangun melalui dua pendekatan yakni intervensi dan *habitiasi*.

Dalam intervensi dikembangkan suasana interaksi belajar dan pembelajaran yang sengaja dirancang untuk mencapai tujuan pembentuk karakter dengan menerapkan kegiatan yang terstruktur. Agar proses pembelajaran tersebut berhasil guna, peran pendidik sebagai sosok panutan sangat penting dan menentukan.

Sementara itu dalam *habitiasi* diciptakan situasi dan kondisi serta penguatan yang memungkinkan peserta didik pada satuan pendidikannya, rumahnya, dan lingkungan masyarakatnya membiasakan diri berperilaku sesuai nilai sehingga terbentuk karakter yang telah diinternalisasi dan dipersonalisasi dari dan melalui proses intervensi. Proses pemberdayaan dan pembudayaan yang mencakup pemberian contoh, pembelajaran, pembiasaan, dan penguatan harus dikembangkan secara sistemik, holistik, dan dinamis. Dalam konteks makro kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, pelaksanaan pendidikan karakter merupakan komitmen seluruh sektor kehidupan, bukan hanya sektor pendidikan nasional. Keterlibatan aktif dari sektor-sektor pemerintahan lainnya, khususnya sektor keagamaan, kesejahteraan, pemerintahan, komunikasi dan informasi, kesehatan, hukum dan hak asasi manusia, serta pemuda dan olahraga juga sangat dimungkinkan. Pada tahap evaluasi hasil, dilakukan asesmen program untuk perbaikan berkelanjutan yang dirancang dan dilaksanakan untuk mendeteksi aktualisasi karakter dalam diri peserta didik sebagai indikator bahwa proses pembudayaan dan pemberdayaan karakter itu berhasil dengan baik, menghasilkan sikap yang kuat, dan pikiran yang argumentatif.

7. Kesimpulan Dan Rekomendasi

Pembentukan karakter melalui pendidikan sebenarnya bukan merupakan hal baru. Jauh sebelum kemerdekaan, Ki Hajar Dewantara telah menyebutkan bahwa pendidikan adalah upaya memajukan budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelektual), dan tubuh anak. Bagian-bagian tersebut tidak boleh dipisahkan agar kita dapat memajukan kesempurnaan anak didik. Pendidikan karakter akan menentukan keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Bahkan Bung Karno mengatakan kegagalan dalam pembangunan karakter akan menyebabkan bangsa Indonesia menjadi kuli (Sudarsono, 2000).

Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan karakter akan bergantung kepada keterpaduan dan keberlanjutan sistem pengembangan program dan kegiatan serta pengarusutamaan pendidikan karakter dalam sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu, peran penjamin mutu dan masyarakat serta dunia usaha juga diperlukan secara aktif dalam pendidikan karakter.

Pemantapan proses pembelajaran yang terintegrasi khususnya dalam setiap kelompok mata pelajaran secara holistik akan menjadi salah satu faktor penentu untuk melaksanakan pendidikan karakter secara lebih efektif, apalagi dengan dilakukannya pengukuhan kurikulum berbasis ideologi Pancasila. Untuk itu pada tahap awal, pendidikan karakter bangsa diarahkan untuk memantapkan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan yang menunjang etika dan kemampuan tinggi dalam memanifestasikan nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan seharusnya diarahkan untuk membantu peserta didik belajar bagaimana memperoleh ilmu pengetahuan beserta nilai yang diusungnya. Di situ tersirat perlunya karakter sebagai wahana perwujudan dimensi aksiologi. Pada dasarnya pendidikan harus diarahkan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memperoleh pengetahuan, teknologi, atau seni; dan bagaimana menggunakannya guna memecahkan masalah kehidupan dengan arif, kreatif, dan bertanggung jawab atas kesejahteraan umat manusia. Sinergi antara pendidikan

DAFTAR RUJUKAN

- Fraenkel, J.R. (1977). "How to teach about Values: An Analytical Approach" dalam Azumardi Azra (2008) "Pembangunan Karakter Bangsa: Pendekatan Budaya, Pendidikan, dan Agama" dalam Saifuddin, A.F & Karim, M (Eds.) *Refleksi Karakter Bangsa*. Jakarta: Kerjasama Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, Yayasan Forum Kajian Antropologi Indonesia, dan Ikatan Alumni Universitas Indonesia.
- Kate Brown & Stephen Fairbrass. (2009). *The Citizenship Teacher's Handbook*. London: Continuum International Publishing Group.
- Kementerian Pendidikan Nasional. (2010a). *Desain Induk Pendidikan Karakter Kementerian Pendidikan Nasional*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kementerian Pendidikan Nasional.
- Kementerian Pendidikan Nasional. (2010b). *Pedoman Pembinaan Akhlak Mulia Siswa melalui Kegiatan Ekstrakurikuler di Sekolah Menengah Pertama (SMP)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Kementerian Pendidikan Nasional. (2010c). *Panduan Pendidikan Karakter di Sekolah Menengah Pertama*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah.
- Kementerian Pendidikan Nasional. (2010b). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional
- Larry P. Nucci & Darcia Narvaez. (2008). *Handbook of Moral and Character Education*. New York: Routledge.
- Thomas Lickona. (1991). *Educating for Character: How Our Schools can Teach Respect and Responsibility*. Broadway: A Bantam Book Publishing History.
- Philips, C. T. "Family as the School of Love" (makalah disampaikan pada National Conference on Character Building, Jakarta 25-26 November 2000).
- Sudarsono, S. (2000). *Karakter Mengantar Bangsa dari Gelap Menuju Terang*. Jakarta.